BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Agency Theory (teori keagenan) merupakan dasar perspektif yang digunakan untuk memahami hubungan antara *corporate governanace* (tata kelola perusahaan) dan manajemen laba. Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan yaitu suatu hubungan atau kontrak antara satu orang atau lebih (*principals*) yang melibatkan orang lain (*agents*). Hubungan terjadi ketika *principal* memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan bisnis yang menguntungkan dalam perusahaan yang akan dijadikan sebagai sumber informasi bagi *principal* dalam pengambilan keputusan.

Pada teori keagenan yang disebut sebagai *principal* adalah pemegang saham atau investor, dan *agent* adalah manajemen. Hubungan antar keduanya seharusnya menghasilkan hubungan yang saling menguntungkan. Namun yang terjadi adalah timbulnya fenomena konflik kepentingan antara pemegang saham atau investor dengan manajemen yang disebut dengan *agency problem* (konflik keagenan). Konflik ini bisa terjadi dikarenakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang setiap individunya termotivasi untuk mendahulukan kepentingan dirinya sendiri.

Terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yang menjelaskan tentang teori keagenan menurut Eisenhardt (1989) dalam Agustia (2013) yaitu:

1. *Self-interest*, dimana manusia secara umum selalu mendahulukan kepentingan dirinya sendiri,

2. *Bounded rationally*, dimana manusia tidak memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan secara pasti, dan
3. *Risk averse*, dimana manusia selalu menghindari resiko yang akan terjadi.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, maka manajer sebagai manusia memiliki kesempatan besar untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri yang disebut dengan sifat *opportunistic* karena manajer mengetahui segala informasi yang ada di dalam perusahaan sedangkan pemegang saham tidak mengetahuinya. Hal ini disebut dengan *asymmetric information* (asimetri informasi) yaitu manajer dapat menyembunyikan suatu informasi tertentu kepada pemegang saham.

Adanya konflik keagenan ini maka menimbulkan yang disebut *agency cost* (biaya keagenan). Konflik keagenan yang disebabkan oleh adanya asimetri informasi perbedaan kepentingan dan biaya keagenan dapat diminimalisir dengan adanya prosedur pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan baik dari pihak pemegang saham maupun manajer. Maka dibentuklah suatu konsep yang dinamakan *coporate governance* (tata kelola perusahaan) dimana diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan konflik dan biaya keagenan yang terjadi serta dapat memberikan kepercayaan kepada pemegang saham akan kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan.

2.1.2. Manajemen Laba

Manajemen diberikan kepercayaan oleh *stakeholder* atau pemangku kepentingan untuk menjalankan dan mengoperasikan perusahaan dengan baik. Wewenang yang diberikan oleh *stakeholder* kepada manajemen yaitu manajemen

harus memberikan informasi yang menguntungkan bagi *stakeholeder* guna dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan kepada manajemen, maka manajemen akan berusaha untuk memaksimalkan laba dimana laba merupakan alat ukur kinerja suatu perusahaan.

Kepercayaan yang sudah diberikan oleh *stakeholder* akan memicu manajemen untuk melakukan segala cara agar laba perusahaan maksimal meskipun dengan cara yang tidak sesuai. Tindakan ini berhubungan dengan adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Maka dapat terindikasi bahwa manajemen akan melakukan manipulasi terhadap laba perusahaan baik menaikkan atau menurunkannya. Kegiatan manipulasi ini disebut dengan *earnings management* (manajemen laba).

Definisi manajemen laba menurut Scott (2012, p.423) yaitu kebijakan akuntansi yang dipilih oleh manajer atau suatu tindakan nyata untuk mempengaruhi baik menaikkan maupun menurunkan laba atau tingkat kerugian yang dilaporkan demi mencapai tujuan tertentu. Definisi lain dari manajemen laba menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Sulistyanto (2008:50) yaitu manajemen laba merupakan suatu tindakan yang terjadi ketika manajer menggunakan keputusan tertentu untuk mengubah pelaporan keuangan dan transaksi atas laporan keuangan tersebut. Hal ini bertujuan untuk memanipulasi *stakeholder* atas kinerja perusahaan atau untuk memengaruhi nilai kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan.

Banyak definisi yang diberikan oleh peniliti terkait dengan *earnings management* (manajemen laba). Sugiri (1998) dalam Widyaningdyah (2001)

membagi definisi *earnings management* menjadi dua bagian yaitu definisi secara sempit dan luas. Pertama, definisi secara sempit yaitu manajemen laba hanya berkaitan dengan bagaimana pemilihan metode akuntansi digunakan, dimana manajemen dalam menentukan besarnya laba hanya bermain dengan komponen *discretionary accrual*. Kedua, definisi secara luas, manajemen laba merupakan sutu tindakan atau perilaku manajer dalam menaikkan atau menurunkan laba perusahaan dimana manajer tersebut bertanggungjawab dan tindakan tersebut tidak memengaruhi kenaikan atau penurunan ekonomi perusahaan tersebut secara jangka panjang.

Manajer dalam melakukan manajemen laba dapat terlibat pada berbagai pola. Berikut adalah pola manajemen laba menurut Scott (2012, p.425):

1. *Taking a bath*, dilakukan dengan cara menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat rendah (rugi) atau sangat tinggi dibandingkan dengan laba pada periode sebelumnya atau sesudahnya.
2. *Income Minimization*, dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya.
3. *Income Maximization*, dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya.
4. *Income Smoothing*, dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata atau *smooth*) dari periode ke periode.

2.1.3. Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan fenomena yang sedang banyak dibicarakan yang merupakan suatu konsep pengendalian yang dikembangkan untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan antara *principal* dengan manajemen. Dengan kata lain *corporate governance* merupakan suatu alat yang dianggap bisa memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan. Definsi tata kelola perusahaan (*corporate* governance) menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) (2001) dalam Naja (2007) yaitu serangkaian aturan yang menetapkan hubungan antara pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dimana sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan atas hak dan kewajiban mereka.

Dalam Darmawati (2003), pada tahun 1999 *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menerbitkan dan mempublikasikan OECD *Principles of Corporate Governance*. Prinsip ini ditujukan kepada negara yang berkenaan guna meningkatkan rerangka hukum *corporate governance* dan memberikan pedoman serta saran bagi pihak yang turun serta dalam pengembangan *good coporate governance.*

Terdapat empat pilar yang melandasi prinsip-prinsip yang diterbitkan oleh OECD yaitu *fairness* (keadilan), *transparency* (keterbukaan), *accountability* (akuntabilitas), dan *responsibility* (tanggungjawab). Berikut adalah penjelasan dari masing-masing pilar:

1. *Fairness* atau keadilan merupakan kesetaraan pemangku kepentingan agar terhindar dari praktik-praktik tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan pihak tersebut.
2. *Transcparancy* atau keterbukaan merupakan ketepatan serta keakuratan atas informasi yang harus diungkapkan antara lain kinerja keuangan, kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.
3. *Accountability* atau akuntabilitas merupakan bentuk pengawasan efektif atas sistem, fungsi dan pertanggungjawaban organ perusahaan yaitu antara pengawas, pengurus, pemegang saham, dan auditor.
4. *Responsibility* atau pertanggungjawaban merupakan bentuk kepatuhan atas pengelolaan perusahaan yang sesuai dengan perundang-undangan dan tetap konsisten memelihara lingkungan bisnis yang sehat.

2.1.4. Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata demi kepentingan perusahaan (Ujiyantho & Pramuka, 2007). Dewan komisaris independen diatur dalam surat keputusan No: Kep-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit sebesar 30% dari jumlah keseluruhan dewan komisaris.

Menurut Sulistyanto (2008, p.144-145) ada beberapa tugas serta tanggungjawab yang harus dilakukan oleh komisaris independen yaitu sebagai berikut:

1. Memastikan perusahaan memiliki strategi bisnis yang efektif seperti memantau jadwal, anggaran dan efektivitas strategi.
2. Perusahaan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku
3. Menjamin prinsip-prinsip *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik khususnya transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan adil kepada pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lain, serta menjamin akuntabilitas organ perusahaan.

2.1.5. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya hal ini sesuai dengan peraturan BAPEPAM No: Kep. 29/PM/2004. Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Komisaris Independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya berasal dari luar perusahaan. Komite audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi segala aspek dalam suatu perusahaan, maka keberadaannya pun telah diatur oleh pemerintah. Menurut Khoiruddin dan Dewi (2016) keberadaan komite audit dianggap sebagai jembatan atau penghubung antara pihak *shareholder* dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani soal pengendalian.

Sulistyanto (2008, p.156) menyatakan bahwa komite audit merupakan pihak yang membuat laporan keuangan disuatu perusahaan lebih terjaga kredibilitasnya karena komite audit berfungsi sebagai pengawas dan pengendalian dalam menciptakan keadilan, keterbukaan, akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Dengan kata lain komite audit memiliki peranan penting untuk perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Terdapat beberapa tujuan dari dibentuknya komite audit disuatu perusahaan seperti yang diungkapan oleh Susiana dan Herawaty (2007) yaitu komite audit memberikan kepastian bahwa: (1) pelaporan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan tidak menyesatkan dan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; (2) struktur pengendalian internal telah memadai; (3) melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan atas penyimpangan dalam bidang keuangan beserta implikasi hukumnya; (4) adanya rekomendasi untuk pemilihan auditor eksternal perusahaan. Dengan pengawasan yang dilakukan sebagaimana sesuai dengan tujuan dibentuknya komite audit, maka semua informasi yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan dapat lebih dipercaya dan berkualitas.

2.1.6. *Free Cash Flow*

Arus kas bebas *(free cash flow)* merupakan arus kas aktual atau tersedia yang dapat didistribusikan kepada investor sesudah perusahaan melakukan semua investasi dalam aktiva tetap, produk baru dan modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan operasinya (Brigham & Houston, 2004:52). Semakin besar *free cash flow* yang tersedia maka perusahaan tersebut memiliki kas yang tersedia

untuk pertumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. Namun jika perusahaan memiliki *free cash flow* yang relatif kecil, maka perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban perusahaan.

Perusahaan yang memiliki *free cash flow* yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan semakin sehat karena mencerminkan laba yang sehat. Dengan adanya peningkatan laba ini dapat menarik perhatian investor dan calon investor untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan. Menurut Chung *et al.* (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki *free cash flow* tinggi, maka akan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba karena perusahaan tersebut terindikasi menghadapi masalah keagenan yang lebih besar. Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan manajemen tidak memanfaatkan *free cash flow* dengan semestinya dan digunakan untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri.

Masalah keagenan yang dimaksud bahwa adanya perbedaan antara pihak manajemen *(agents)* dengan pemegang saham atau investor. *Principle* memiliki kepentingan untuk memaksimumkan kekayaannya, sehingga menginginkan *free cash flow* tersebut dibagikan sebagai deviden. Sedangkan *agents* lebih menginginkan *free cash flow* tersebut digunakan untuk membiayai investasi. Maka dari itu, *free cash flow* memiliki kemungkinan berpengaruh terhadap adanya tindakan atau praktik manajemen laba.

2.1.7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan. Menurut Hery (2017:11) ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar

(large firm), perusahaan menengah *(medium firm),* perusahaan kecil *(small firm)*. Klasifikasi besar kecilnya perusahaan berdasarkan total aktiva, *log size*, nilai saham dan sebagainya. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin banyak investor menanam modal, semakin besar penjualan dalam suatu perusahaan maka semakin besar perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi perusahaan semakin besar perusahaan itu di kenal oleh masyarakat.

Perusahaan besar memiliki pengaruh pengambilan keputusan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh perusahaan besar memiliki perhatian yang lebih besar oleh pihak eksternal sehingga kebijakan yang dipilih perusahaan akan berdampak lebih besar terhadap pengambilan keputusan ekonomi pihak eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil. Mahawyahrti dan Budiasih (2016) berpendapat bahwa bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.

Moses (1997) dalam Gunawan, dkk (2015) mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba (salah satu bentuk dari manajemen laba) dibandingkan dengan perusahaan kecil karena memiliki biaya politik lebih besar.

2.2. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan terkait *corporate governance,* dan *free cash flow* terhadap manajemen laba. Penelitian yang

dilakukan oleh Agustia (2013) tentang pengaruh faktor *good corporate governance, free cash flow, dan leverage* terhadap manajemen laba pada 14 perusahaan tekstil yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang dipilih menggunakan *purposive sampling* selama periode penelitian tahun 2007-2011. Hasil penelitian menujukan bahwa *good corporate govermance* tidak berpengaruh terahadap manajemen laba, sedangkan *leverage ratio* berdasarkan penelitian dari hasil analisis menyimpulkan bahwa faktor tersebut berpengaruh terhadap manajemen laba yang menyatakan perusahaan. Variabel *free cash flow* berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Mawardi, dkk (2019) tentang pengaruh faktor *good corporate governance, free cash flow,* dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan batu bara. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu *good corporate governance, free cash flow,* dan *leverage.* Sedangkan variable dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Kemudian variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, dan *free cash flow* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Restuningdiah (2011) tentang komisaris independen, komite audit, internal audit dan *risk mangement committee* tehadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu komisaris independen, komite audit, internal audit dan *risk mangement committee.* Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Hasi dari penelitian ini

menunjukan bahwa mekanisme *internal governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen, efektifitas komite audit tidak signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) tentang pengaruh *corporate govermance* terhadap manajemen laba diindustri perbankan indonesia. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti yaitu *corporate govermance*. Sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manaemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Cholifah, dkk (2016) tentang pengaruh *profitabilitas, leverage* dan *free cash flow* terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel independen yaitu *free cash flow* berpengaruh signifikan terhadap manajeman laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia dan Hernawati (2016) tentang pengaruh komisaris independen, ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap manajemen laba. Variabel independen berupa komisaris independen, ukuran perusahaan dan profitabilitas dengan variabel dependen berupa manajemen laba. Hasil penelitian tersebut adalah komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Murni (2017) dengan judul penelitian pengaruh arus kas bebas, profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap manajemen laba pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. variabel independen arus kas bebas, profitabilitas,

ukuran perusahaan dan *leverage* dan variabel dependen berupa manajemen laba. Hasil penelitian tersebut adalah arus kas bebas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) tentang mekanisme *corporate governance*, manajemen laba dan kinerja keuangan (studi pada perusahaan go public sector manufaktur). Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris. Dan variabel dependen yang digunakan yaitu manajemen laba. Hasil penelitian tersebut adalah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila dan Daljono (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, dan reputasi auditor terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan, ukuran komite audit, terbukti tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf, dkk (2017) melakukan penelitian tentang dampak free cash flow, komite audit, dan pengungkapan *other comprehensive income* terhadap manajemen laba pada perusahaan pertambangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *free cash flow* berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan komite audit dan penungkapan o*ther comprehensive income* tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.3. Hipotesis Penelitian

Teori keagenan atau *agency theory* merupakan landasan yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami adanya hubungan *corporate governance*, *free cash flow* dan manajemen laba. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktik manajemen laba dan salah satu faktornya yaitu *free cash flow*. Perusahaan yang memiliki *free cash flow* tinggi maka perusahaan tersebut dinilai sehat. Namun hal itu akan menimbulkan masalah keagenan atau *agency theory* dimana pihak manajemen dan pemegang saham atau investor bersama-sama menginginkan *free cash flow* tersebut untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Menurut Agustia (2013), perilaku manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba dapat diminalisir dengan menerapkan tata kelola perusahaan *(corporate governance)*. Dewan komisaris independen dan komite audit merupakan salah satu tolak ukur dalam menentukan seberapa besar tata kelola perusahaan sudah diterapkan.

2.3.1. Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan dengan independen.

Keberadaan komisaris independen disuatu perusahaan merupakan penunjang system pengawasan terhadap pelaporan kegiatan operasional perusahaan. Komisaris independen menjamin adanya transsparansi atas laporan yang disajikan sehingga meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

perusahaan atas kualitas informasi yang didapatkan. Besarnya jumlah dewan komisaris independen akan mempersepit gerak atau kesempatan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) serta Nabila dan Daljono (2012) bahwa proporsi dewan komisaris indpenden berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai dewan komisaris independen adalah:

H_1: Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.2. Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008) bahwa komite audit bertugas untuk melakukan pengawasan demi meningkatkan efektivitas dalam keterbukaan atas pelaporan keuangan dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan. Komite audit memiliki peran penting yaitu membantu dewan komisaris dalam mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Keberadaan komite audit untuk memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen sudah secara relevan atau disajikan sebagaimana mestinya serta memonitor kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan. Dengan adanya pengawasan dari pihak komite audit maka informasi yang ada dalam laporan keuangan lebih informatif dan berkualitas.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Juhmani (2017), Sari dan Putri (2014), serta Nasution dan Setiawan (2007) bahwa komite audit

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai komite audit adalah:

$H_{2:}$ Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2.3.3. *Free Cash Flow* terhadap Manajemen Laba

White *et al.* (2003:68) mengungkapkan bahwa semakin besar *free cash flow* yang tersedia dalam suatu perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk pertumbuhan, pembayaran hutang, dan deviden. Hal ini juga dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai *free cash flow* yang dimiliki perusahaan, maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan semakin tidak sehat.

Suatu perusahaan yang memiliki *free cash flow* tinggi maka akan terindikasi masalah keagenan yang besar dan kemungkinan akan melakukan praktik manajemen laba (Chung *et al.*, 2005). Masalah keagenan yang terjadi adalah pemegang saham (investor) menginginkan arus kas bebas didistribusikan kepada mereka untuk meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan, manajemen menginginkan arus kas bebas tersebut ditahan untuk meningkatkan perusahaan hingga pada ukuran yang lebih optimal.

Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yaitu Cholifah, Afandi & Jaswadi (2016) bahwa *free cash flow* berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai *free cash flow* adalah:

H_3: *Free Cash Flow* berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

2.4. Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat kerangka pemikiran variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

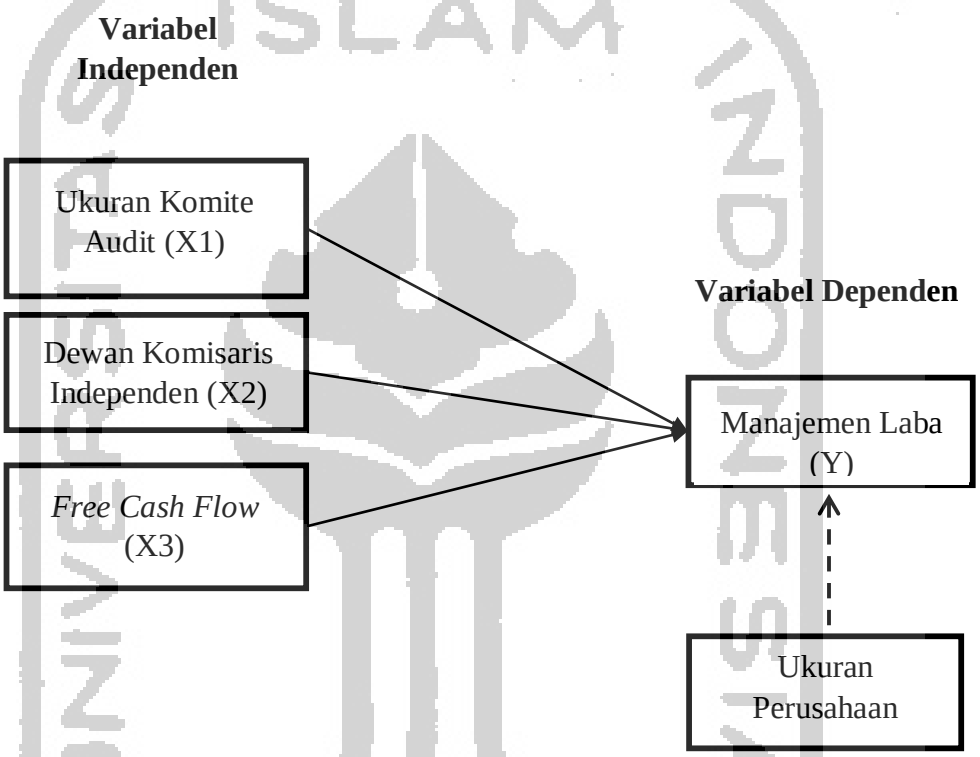

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian